

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, H. Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- _____ dan Kusuma, Rahmawati. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Khahkim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Cet. IV, Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Khairani. *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Meliala, A. Qirom. *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Nugraha, Safri. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Center For Law and Good Governance Studies (CLGSFHUI). Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2014.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Cet. I, Edisi. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Jurnal

Agishintya Chika dan Hoesin Siti. “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan.” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. 2022.

Ayu Garlita. “Efektivitas Pengawasan Norma Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta melalui Wajib Laport Ketenagakerjaan secara Online.” *Universitas Indonesia*. 2019.

Hakim Syerrin, Haryanto Imam. “Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.” *Jurnal USM Law Review*. 2023.

Hascaryo Venia, Solechan, Sa’adah Nabitatus. “Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Yang Diberikan Pengusaha Terhadap Pekerja Yang Mengundurkan Diri Sebelum Berakhirnya Masa Kontrak (Studi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Pusat Palangka Raya).” *Diponegoro Law Journal*. 2020.

Kornelius Benuf, dan Azhar Muhammad. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan*. 2020.

Kusuma Ahmad, Edith Ratna, Irawati. “Kedudukan Hukum Pekerja PKWT Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.” *Notarius*. 2020.

Maulandari Fernanda, Musfianawati, Setiawan Sidi. “Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau dari Jaminan Hak-Hak

Pekerja (Undang-Undang NRI Nomor 13 Tahun 2003).” *Welfare State*. 2025

Muttaqin Fajri. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Pada Beberapa Perusahaan Di Provinsi DKI Jakarta.” *Universitas Indonesia*. 2019.

Sonhaji. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.” *Administrative Law & Governance Journal*. 2019.

Taqiyya Saufa. “PKWT Tidak Didaftarkan ke Disnaker, Ini Akibat Hukumnya.” *Hukum Online*. 2021.

Internet

Disnakertrans Jateng.
<https://disnakertrans.jatengprov.go.id/publik/struktur/OThlMjk1ZjIzYmJlMDAxZTMxODk1NzAxOGExYmRlNzU4MmRiZGM3NDE4MTNmOTVmZjgwMjM5ZTZiYzRhNA-->.

Disnaker Kota Semarang. <https://disnaker.semarangkota.go.id/profil/opd>.

Satudata Kemnaker. <https://satudata.kemnaker.go.id/data-hubungan-industrial-dan-jamsostek>.